

GHIRAH BERPOLITIK PEREMPUAN FATAYAT NU DI KABUPATEN ASAHAN

THE POLITICAL PASSION OF FATAYAT NU WOMEN IN ASAHAN REGENCY

Nafisa Agda Maghrusyah^{1*}, Uqbatul Khair Rambe²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nafisa0404211013@uinsu.ac.id^{1*}, uqbatulkhoir@uinsu.ac.id²

Abstract

This study examines the political enthusiasm of female cadres of Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) in Asahan Regency, female cadres of Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) in Asahan Regency show a strong enthusiasm (passion) in politics even though women's representation in the legislature is still limited. This study aims to analyze the political enthusiasm of female cadres of Fatayat NU, the driving factors, and the obstacles they face. Using a descriptive qualitative approach and field research methods through interviews, documentation, and observation, the study found that Fatayat NU cadres are active in various strategic positions in government and elections. Their political enthusiasm is motivated by an awareness of gender justice, while the main obstacles come from limited human resources and patriarchal culture. To overcome this, Fatayat NU runs a cadre development, advocacy, and research program to strengthen the political capacity of its female cadres.

Keywords: Political Passion, Women, Fatayat NU.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ghirah berpolitik perempuan kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Asahan, perempuan kader Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Asahan menunjukkan semangat (ghirah) kuat dalam berpolitik meskipun keterwakilan perempuan di legislatif masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis ghirah politik perempuan Fatayat NU, faktor pendorong, serta hambatan yang mereka hadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode field research melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, penelitian menemukan bahwa kader Fatayat NU aktif di berbagai posisi strategis pemerintahan dan pemilihan. Semangat politik mereka dilatarbelakangi kesadaran akan keadilan gender, sementara hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan budaya patriarki. Untuk mengatasi hal tersebut, Fatayat NU menjalankan program pengkaderan, advokasi, dan penelitian guna memperkuat kapasitas politik perempuan kadernya.

Kata Kunci: Ghirah Politik, Perempuan, Fatayat NU.

PENDAHULUAN

Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) merupakan organisasi otonom perempuan muda di lingkungan Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, dan pemberdayaan perempuan (Damayanti 2024). Meskipun bukan organisasi politik dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, Fatayat NU sendiri telah berperan dalam membangun kesadaran politik perempuan, terutama dalam mendorong partisipasi aktif perempuan di ruang-ruang publik dan pengambilan kebijakan sebagai bentuk kesetaraan dan keadilan gender. Sebagaimana ditegaskan oleh Ida Fauziah (2015), perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam politik, guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mewakili kepentingan semua kelompok masyarakat (Fauziah 2015). Partisipasi politik merupakan aspek krusial dalam dinamika demokrasi terutama di negara berkembang (Syahputra, Rambe, dan Damanik 2024), tak

terkecuali bagi kaum perempuan sebagai indikator penting dari kualitas demokrasi dan representasi yang berkeadilan.

Maka dari itu muncul urgensi representasi perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan sebagai representasi yang adil dan setara, pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan (Pramudita, Suyaman, dan Mulyanti 2024). Dalam hal ini Fatayat NU sudah melahirkan kader-kader perempuan yang mempunyai ghirah dan kapabilitas dalam berpolitik meskipun secara lembaga Fatayat NU itu sendiri tidak boleh terafiliasi dalam politik. Secara personal kader-kader fatayat NU mempunyai ghirah yang kuat dalam berpolitik, oleh sebab itu hal ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik untuk diteliti. Salah satu tokoh fatayat NU yang juga telah menjadi tokoh politik perempuan di Indonesia adalah Khofifah Indar Parawansa yang merupakan mantan ketua pengurus pusat fatayat NU periode 2010-2015 dan saat ini menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Khofifah juga sudah pernah mencapai posisi sebagai menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta menteri sosial. Keberhasilannya menjadi gubernur menunjukkan kepemimpinan dan kemampuan politik yang kuat, yang berakar dari pengalamannya di fatayat NU (Mahfudhi dan Aditya 2022).

Meskipun sudah ada tokoh-tokoh perempuan yang berhasil terjun ke dunia politik, tak sedikit pula perempuan yang masih terjebak dalam stereotip gender yang kerap menghambat perempuan untuk terlibat dalam ranah politik dan kebijakan publik. Untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan kajian menyeluruh mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam ghirahnya untuk berpolitik, dan bagaimana fatayat NU menyikapi hambatan dan tantangan tersebut. Selain itu dibutuhkan juga narasumber tokoh politik perempuan yang merupakan kader fatayat, untuk menggali lebih dalam mengenai hal apa yang mendorong dan menghambat perempuan dalam berpolitik di Indonesia umumnya dan di Kabupaten Asahan khususnya. Penelitian ini berfokus pada perempuan fatayat, karena fatayat NU merupakan salah satu ormas berbasis NU yang dinilai hadir dan mampu mentransformasikan fenomena kesetaraan gender (Safi' dan Ismanto 2021).

Berdasarkan realitas sosial dan dinamika politik lokal, artikel ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian: (1) Bagaimana ghirah berpolitik perempuan Fatayat NU di Kabupaten Asahan terwujud dalam praktik dan keterlibatan politik mereka? (2) Faktor-faktor apa saja yang mendorong perempuan Fatayat NU untuk terlibat aktif dalam dunia politik? dan (3) Hambatan apa yang dihadapi perempuan, khususnya kader Fatayat NU, dalam upaya memperluas partisipasi politik mereka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk menganalisis semangat perjuangan politik kader perempuan Fatayat NU, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya, serta mengevaluasi sejauh mana proses kaderisasi dan struktur sosial-kultural di Asahan memengaruhi partisipasi politik perempuan.

Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ghirah berpolitik perempuan Fatayat NU di Kabupaten Asahan, mengidentifikasi faktor yang mendorong perempuan fatayat untuk berpolitik serta hambatan dan tantangan yang mereka hadapi, sekaligus merumuskan solusi dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut. Harapannya, temuan dalam

penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik mengenai ghirah politik perempuan dalam organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi Fatayat NU, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam memperkuat peran perempuan di ranah politik. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong lahirnya strategi pemberdayaan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan, sehingga kader perempuan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkontribusi secara nyata dalam pengambilan keputusan publik, khususnya di Kabupaten Asahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Buku “Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran” yang ditulis oleh Affiah dkk., (2005) merupakan dokumentasi penting yang merekam perjalanan sejarah organisasi Fatayat NU, sejak masa perintisan hingga era reformasi. Buku ini menyajikan narasi perkembangan Fatayat NU dalam beberapa periode penting, termasuk masa konsolidasi, kevakuman politik di era Orde Baru, hingga kebangkitan dan keterlibatan aktif dalam advokasi sosial-politik pasca reformasi. Buku ini menjadi sumber acuan penting dalam memahami dinamika serta peran Fatayat NU dalam mendorong partisipasi perempuan dalam ruang publik dan politik secara aktif dan progresif (Affiah dkk. 2005).

Artikel yang ditulis oleh Maya Nur Agustin dan Maya Mustika Kartika Sari berjudul “Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam Pendidikan Politik bagi Perempuan” membahas peran aktif Fatayat NU dalam memberikan pendidikan politik kepada perempuan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa partisipasi Fatayat NU tidak hanya bersifat simbolik, tetapi terwujud dalam gerakan nyata yang mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Hal ini menunjukkan komitmen Fatayat NU sebagai organisasi perempuan Islam dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan perempuan (Agustin dan Sari 2016).

Artikel yang ditulis oleh Panas Mahfudhi dan Aditya Perdana berjudul “The Relationship Between Civil Society Organization and Political Party in Legislative Election” menjelaskan bahwa strategi Fatayat NU dalam memenangkan calon legislatif perempuan sangat dipengaruhi oleh relasi konstruktif dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Relasi ini menunjukkan bagaimana organisasi perempuan keagamaan dapat membangun jejaring politik yang strategis untuk mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam artikel ini juga dijelaskan mengenai tokoh perempuan kader fatayat NU Khofifah Indarparawansa yang juga merupakan tokoh politik perempuan Indonesia, menggambarkan semangatnya dalam berpolitik (Mahfudhi dan Aditya 2022).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis ghirah berpolitik perempuan fatayat NU di Kabupaten Asahan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan analisis mendalam mengenai pengalaman, semangat, dan motivasi perempuan fatayat dalam merepresentasikan kaumnya di ranah politik (Phillips 1995). Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), guna menganalisis fenomena kehadiran substantif perempuan dalam politik yang

dipengaruhi oleh gerakan sosial, Fatayat NU yang dianggap sebagai agen perubahan berbasis nilai dan identitas. Penelitian ini menggunakan triangulasi data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan pada informan aktif di Fatayat NU untuk menggali persepsi politik, ghirah kader perempuan, peran Fatayat NU, serta tantangan struktural dan kultural yang dihadapi. Dokumentasi mencakup analisis dokumen organisasi, jurnal, buku, dan berita untuk memahami konteks partisipasi politik perempuan. Observasi dilakukan pada kegiatan pemberdayaan perempuan oleh Fatayat NU. Analisis data mengikuti model Spradley yang mencakup tahapan observasi hingga penemuan tema, memungkinkan pemahaman mendalam berdasarkan pengalaman informan. (Koeswinarno 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ghirah secara bahasa berarti cemburu. Ghirah adalah dorongan emosional-spiritual berakar pada rasa semangat internal untuk menjaga dan melindungi sesuatu yang dianggap suci atau bernilai tinggi. Berbeda dari nafsu negatif, ghirah dipandang sebagai energi positif yang menyehatkan jiwa dan mengundang keberkahan karena bersumber pada kecintaan yang benar dan kesadaran moral yang tajam (Zuhriyandi dan Yasa 2024). Ketika dikaitkan dengan politik, ghirah dapat dimaknai sebagai semangat protektif dan komitmen ideologis seorang individu atau kelompok terhadap nilai-nilai politik yang diyakini benar, adil, dan mencerminkan kemuliaan. Sehingga, ghirah politik dapat diartikan sebagai kesadaran moral dan semangat keimanan yang mendorong partisipasi aktif dalam ruang politik untuk membela nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemuliaan Islam ketika menghadapi ancaman, pengabaian, atau ketidakadilan dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah kader perempuan Fatayat NU di Kabupaten Asahan memiliki ghirah yang kuat dalam berpolitik dan telah berhasil menempati berbagai posisi strategis di ranah publik, khususnya dalam bidang politik. Beberapa di antaranya menjabat sebagai kepala desa, lurah, pendamping desa, bendahara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), anggota KPU Kabupaten Asahan, serta sebagai penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan, mulai dari kecamatan hingga tingkat terbawah sebagai bentuk dari ghirah dalam berpolitik. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat kader Fatayat NU yang berhasil menduduki posisi di lembaga legislatif.

Selain di bidang politik, kader Fatayat NU juga aktif berkontribusi di sektor lain, seperti pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam posisi-posisi tersebut memungkinkan hadirnya perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan anak. Untuk memperkuat kapasitas kadernya, Fatayat NU Asahan menyelenggarakan program kaderisasi formal dan pelatihan kepemimpinan secara bertahap. Program tersebut meliputi Latihan Kader Dasar (LKD), Latihan Kader Lanjutan (LKL), hingga Pelatihan Kader Nasional (PKN), yang bertujuan mencetak kader perempuan yang transformatif, adaptif, dan siap berperan di berbagai sektor strategis, termasuk dunia politik (Rini dkk. 2022).

Faktor Pendorong Ghirah Berpolitik Perempuan Fatayat NU

Perempuan kerap dihadapkan pada berbagai persoalan multidimensi yang menyentuh aspek fundamental kehidupan, seperti permasalahan ekonomi, akses terhadap pendidikan anak, serta isu-isu terkait kesehatan perempuan dan anak. (Affiah dkk. 2005) Dalam banyak kasus, suara dan pendapat perempuan terhadap persoalan-persoalan tersebut cenderung tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan, baik di ranah domestik maupun publik. Kondisi ini juga tercermin di Kabupaten Asahan, di mana masih terbatasnya representasi dan partisipasi perempuan dalam ruang politik berdampak pada kurangnya perspektif gender dalam kebijakan lokal.

Melihat realitas tersebut, kader-kader Fatayat NU di Kabupaten Asahan berupaya untuk mendorong perempuan, khususnya anggota dan kader internal organisasi, agar aktif memasuki arena politik. Partisipasi perempuan dalam politik dipandang sebagai strategi penting untuk membuka ruang keterlibatan yang lebih luas dalam menyuarakan kepentingan perempuan dan anak. Napitupulu (2025) menegaskan, melalui keterlibatan politik, kader perempuan tidak hanya memperoleh legitimasi formal untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga memiliki peluang untuk terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap persoalan-persoalan yang selama ini kurang terakomodir (wawancara, 3 Juli 2025). Dengan demikian, dorongan Fatayat NU terhadap keterlibatan politik perempuan menjadi bagian dari upaya strategis dalam mewujudkan representasi substantif dan keadilan sosial di tingkat lokal.

Dengan begitu perempuan tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga berperan sebagai role model, mentor, dan fasilitator jaringan bagi sesama perempuan. Menurut Kurniawati (2025), kehadiran figur perempuan di pucuk kepemimpinan menegaskan bahwa akses terhadap jabatan politik bukan monopoli laki laki, sehingga mematahkan bias struktural dan membuka “jalur pipa” (pipeline) bagi kader perempuan lain untuk meniti karier serupa (Wawancara, 5 Juli 2025). Dengan demikian, perluasan representasi perempuan bukan sekadar pencapaian simbolik tapi memproduksi ruang transformatif yang memungkinkan distribusi peluang, sumber daya, dan pengaruh secara lebih merata di antara kaum perempuan, sekaligus meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap problematika mereka.

Dengan kata lain, semangat atau *ghirah* berpolitik yang dimiliki kader Fatayat NU tidak semata-mata didorong oleh kepentingan individual atau pragmatis, melainkan lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya mewujudkan kehidupan yang berkeadilan gender (Agustin dan Sari 2016). Hadirnya aktivis politik perempuan Fatayat merupakan bentuk ikhtiar strategis dalam mengaktualisasikan visi dan misi organisasi, yaitu memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan melalui penguatan hak dan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Fatayat NU sendiri memiliki Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) yang dibentuk pada tahun 2000 sebagai unit pendukung dalam bidang advokasi, hukum, dan politik (Pimpinan Pusat Fatayat NU 2014). Lembaga ini mencerminkan implementasi visi dan misi Fatayat NU dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan. Melalui penguatan hak-hak

perempuan di bidang hukum, advokasi, dan politik, lembaga ini menjadi instrumen strategis organisasi dalam mendorong perubahan sosial yang berkeadilan gender.

Manifestasi Ghirah Politik Kader Fatayat NU Asahan

Manifestasi ghirah politik kader Fatayat NU di Kabupaten Asahan tercermin melalui keterlibatan aktif mereka dalam berbagai posisi strategis dalam struktur pemerintahan, pemilihan, dan partai politik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah kader perempuan Fatayat telah berhasil menembus ruang-ruang pengambilan keputusan, yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan, terdapat Hartati Rambe yang menjabat sebagai Lurah Karanganyar, Kecamatan Kisaran Timur, serta Feby Annazmi sebagai Kepala Desa Banjar, Kecamatan Air Joman. Peran di tingkat lain juga tampak melalui keterlibatan Eviana Sirait dan Siti Maryam sebagai pendamping desa di Kecamatan Lima Puluh (Kabupaten Batubara) dan Kecamatan Silau Laut (Kabupaten Asahan), yang berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis desa.

Di ranah kelembagaan pemilihan, kader Fatayat juga hadir melalui Nurasli Napitupulu yang menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Asahan, serta Maulida Akmal Panjaitan yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu tingkat kecamatan di Kota Kisaran Barat dan juga beberapa kader lain yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih rendah. Dalam konteks kepartaian, Dewi Kurniawati menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Asahan, dan juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024 meskipun belum berhasil memperoleh kursi. Kehadiran mereka di berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa ghirah politik kader Fatayat bukan sekadar wacana, tetapi telah mewujudkan dalam bentuk partisipasi nyata. Hal ini sekaligus mencerminkan keberhasilan proses kaderisasi organisasi dalam menumbuhkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis di tingkat lokal.

Untuk memperkuat argumen mengenai manifestasi ghirah politik kader Fatayat NU di Kabupaten Asahan, penelitian ini menyoroti sosok Nurasli Napitupulu sebagai tokoh representatif yang menunjukkan konsistensi dan keberhasilan dalam keterlibatan politik. Pemilihan tokoh ini didasarkan pada rekam jejaknya yang mencerminkan semangat politik yang terbangun melalui proses kaderisasi di lingkungan Fatayat NU. Perjalanan politiknya mencerminkan konsistensi, ketekunan, dan semangat juang dalam memperjuangkan keterlibatan perempuan di ranah politik. Karier politiknya dimulai pada tahun 2004 ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meskipun belum berhasil terpilih. Upaya tersebut menandai langkah awalnya dalam memasuki dunia politik elektoral. Pada tahun 2010, ia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Asahan, posisi yang memperkuat kapasitas kepemimpinannya dalam organisasi perempuan muda NU.

Tahun 2018, ia mengikuti seleksi sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan dan berhasil menembus 10 besar, meskipun belum terpilih. Namun demikian, kegagalannya saat itu tidak menyurutkan semangatnya. Justru pada akhir tahun yang sama, ia meraih amanah yang lebih tinggi sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat

NU Provinsi Sumatera Utara, yang menandai pengakuan atas kapasitas kepemimpinannya di tingkat regional. Di tengah kiprahnya dalam organisasi, ia juga aktif sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan pada periode 2018–2023, menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses demokrasi lokal. Akhirnya, pada tahun 2023, ia terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten Asahan, sebuah posisi strategis yang menunjukkan keberhasilan akumulatif dari proses panjang keterlibatan politiknya.

Kisah Nurasli Napitupulu menjadi bukti konkret bahwa ghirah politik yang dibangun melalui ruang kaderisasi Fatayat NU mampu melahirkan figur-figur perempuan dengan kapasitas kepemimpinan dan keberanian untuk memasuki ruang pengambilan keputusan. Tidak hanya mencerminkan hasil dari proses kaderisasi yang sistematis, tetapi juga menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar simbolik, melainkan lahir dari kesadaran ideologis dan komitmen untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan gender. Perjalanan politik Nurasli menunjukkan bahwa Fatayat NU tidak hanya berperan dalam membentuk kesadaran politik perempuan, tetapi juga menjadi kendaraan strategis bagi perempuan untuk menembus struktur kekuasaan formal di tingkat lokal. Nurasli Napitupulu menyatakan:

“Fatayat NU sebagai wadah kaderisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kapasitas, serta menanamkan nilai-nilai ideologis dan sosial yang konstruktif. Berbagai muatan positif yang diberikan dalam proses kaderisasi tersebut menjadi nilai tambah yang signifikan, sehingga mampu membangkitkan ghirah berpolitik di kalangan perempuan muda NU. Lebih dari itu, pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama berproses di Fatayat NU dapat menjadi pondasi yang kokoh dan batu pijakan awal bagi perempuan untuk melangkah dan berkontribusi dalam dunia politik secara lebih aktif dan strategis” (wawancara, 03 Juli 2025).

Hambatan dan Tantangan bagi Perempuan

Meskipun keterlibatan kader Fatayat NU di berbagai posisi strategis menunjukkan adanya ghirah politik yang kuat, namun secara umum partisipasi perempuan dalam politik elektoral, khususnya di Kabupaten Asahan, masih tergolong rendah. Hingga saat ini, belum ada kader Fatayat NU yang berhasil menduduki kursi legislatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa perempuan, termasuk kader Fatayat, masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Menurut Nurasli Napitupulu (2025), salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perempuan yang benar-benar memiliki kapasitas politik yang memadai. Minimnya kader perempuan yang memiliki pengalaman, akses, dan pengetahuan yang cukup dalam bidang politik menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam posisi strategis, termasuk di lembaga legislatif (wawancara, Juli 2025).

Selain itu, Menurut Kahpi dan Harahap (2024) budaya patriarki, beban ganda, kurangnya pendidikan politik, dan hambatan struktural dalam partai politik menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, khususnya di wilayah Asahan masih menjadi penghalang kultural yang signifikan. Politik masih dianggap sebagai ruang dominasi laki-laki, sehingga perempuan yang mencoba memasuki ranah

tersebut sering kali berhadapan dengan resistensi sosial, diskriminasi, dan minimnya dukungan dari lingkungan sekitar (Kahpi dan Harahap 2024).

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi kader perempuan Fatayat NU adalah kompleksitas problem sosial yang mereka wakili terkait ekonomi, keluarga, pendidikan, dan kesehatan anak. Kondisi ini menuntut perempuan untuk tidak hanya ikut serta dalam proses politis, tetapi juga aktif menginisiasi solusi kebijakan (Syahra, Maulidia, dan Khikmawanto 2024). Hal ini memaksa mereka bekerja lebih keras untuk menembus struktur kekuasaan demi menjawab kebutuhan kaum perempuan dan anak, yang hanya bisa dimengerti secara mendalam oleh mereka sendiri.

Solusi Dalam Menghadapi Hambatan dan Tantangan

Untuk merespons berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik, khususnya kader Fatayat NU di Kabupaten Asahan, diperlukan strategi yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Salah satu solusi utama adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) perempuan melalui akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Tingkat pendidikan tidak hanya membuka ruang kesadaran kritis bagi perempuan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengikis dominasi budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat (Fabelia dkk. 2022). Dengan bekal pengetahuan perempuan akan lebih percaya diri karena akan meningkatkan status sosialnya, memiliki daya tawar politik, serta mampu memahami dinamika sosial dan pemerintahan secara lebih luas. Karena Status sosial ekonomi turut memengaruhi partisipasi politik, di mana mereka yang memiliki latar pendidikan lebih tinggi cenderung memahami hak politiknya dan berpartisipasi secara rasional (Safitri, Idris Harahap, dan Warnisyah 2025).

Selain itu, pendidikan politik yang sistematis dan terstruktur bagi perempuan juga menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan politik dapat meningkatkan literasi demokrasi, memperluas jejaring sosial-politik, serta memperkuat keberanian perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pendidikan politik yang dirancang secara kontekstual dan berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan (Fitriyah, Zain, dan Makki 2024).

Dalam konteks ini, Fatayat NU telah memiliki sejumlah program pemberdayaan yang dapat membantu kader-kader perempuannya dalam menghadapi hambatan dan tantangan politik. Di antaranya:

- a) Bidang Organisasi, Pendidikan, dan Pengkaderan, yang mencakup pelatihan kepemimpinan berjenjang seperti Latihan Kader Dasar (LKD), Latihan Kader Lanjutan (LKL), hingga Pelatihan Kader Nasional (PKN). Program ini bertujuan membentuk kader perempuan yang ideologis, progresif, dan siap terlibat dalam pengambilan kebijakan publik (Pimpinan Pusat Fatayat NU 2010).
- b) Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi, yang memberikan penguatan kapasitas kader dalam memahami sistem hukum dan politik nasional, serta keterampilan advokasi yang dibutuhkan untuk memperjuangkan isu-isu perempuan, termasuk dalam ranah legislatif maupun eksekutif (Pimpinan Pusat Fatayat NU 2010).

- c) Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang berperan dalam mengumpulkan data, menyusun rekomendasi kebijakan, serta mengidentifikasi isu-isu aktual yang berdampak terhadap perempuan. Program ini menjadi basis intelektual dan strategis dalam merumuskan langkah-langkah pemberdayaan berbasis kebutuhan nyata di lapangan (Pimpinan Pusat Fatayat NU 2010).

Dengan kombinasi strategi pendidikan, penguatan kaderisasi, serta program-program pemberdayaan yang terstruktur, Fatayat NU memiliki potensi besar dalam mendorong kader perempuannya untuk menembus batas-batas sosial, struktural, dan kultural yang selama ini menghambat partisipasi mereka dalam politik.

KESIMPULAN

Ghirah berpolitik perempuan Fatayat NU di Kabupaten Asahan tercermin dari semangat mereka dalam menempati berbagai posisi strategis di ranah publik, seperti kepala desa, lurah, anggota KPU, hingga pengurus partai politik. Meskipun Fatayat NU bukan organisasi politik, semangat ideologis dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan gender mendorong kader-kader perempuannya untuk aktif dalam dunia politik sebagai bentuk aktualisasi peran sosial. Keterlibatan ini membuktikan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan Fatayat NU telah berhasil menumbuhkan kesadaran politik kader perempuan dan menciptakan ruang partisipasi nyata di level lokal.

Dorongan utama bagi kader perempuan Fatayat NU untuk terlibat dalam politik berasal dari kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan sosial dan representasi gender dalam pengambilan kebijakan. Keterlibatan mereka bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi berangkat dari keprihatinan terhadap minimnya ruang suara perempuan dalam kebijakan publik, khususnya yang menyangkut isu-isu perempuan dan anak. Fatayat NU, melalui program kaderisasi, advokasi, dan lembaga seperti LKP3A, mendorong kader perempuannya untuk menjadi agen perubahan, role model, serta pemimpin yang responsif terhadap persoalan masyarakat.

Namun demikian, ghirah politik perempuan Fatayat NU masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan akses politik, dominasi budaya patriarki, beban ganda, dan minimnya pendidikan politik menjadi tantangan utama yang menghambat keterlibatan perempuan secara maksimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Fatayat NU terus memperkuat program pemberdayaan melalui pendidikan politik, pelatihan kader, dan advokasi kebijakan, agar kader perempuan mampu menembus ruang-ruang pengambilan keputusan secara lebih strategis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, Neng Dara, Umi Khusnul Khotimah, Maya S Masykuriah, dan Siti Masyrifah. 2005. *Menapak Jejak Fatayat NU Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran*. Jakarta: PP Fatayat NU.

- Agustin, Maya Nur, dan Maya Mustika Kartika Sari. 2016. "Partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama Sidoarjo Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 3 (4): 1073–88.
- Damayanti, Tasya Aulia. 2024. "Peran Organisasi Fatayat NU dalam Penyebaran Islam di Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam* 4 (1): 33–39.
- Fabelia, Valentina Roselline, Katon Galih Setyawan, Sarmini, dan Ali Imron. 2022. "Studi Tentang Akses Menempuh Pendidikan Tinggi Bagi Perempuan." *Dialektika Pendidikan IPS* 2 (2): 35–47.
- Fauziah, Ida. 2015. *Geliat Perempuan Pascareformasi (Agama, Politik, gerakan sosial)*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Fitriyah, Nina Sa'idah, Muh Hamdi Zain, dan Nabila Makki. 2024. "Penguatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Sebagai Pilar Demokrasi Yang Inklusif." *Jurnal Abdi Publik* 4 (1): 89–99.
- Kahpi, Mhd. Latip, dan Asriana Harahap. 2024. "Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 8 (1): 64–77.
- Koeswinarno. 2015. "Memahami Etnografi Ala Spradley Ethnographic Understanding by Spradley." Semarang: Holt, Rinehart and Winston.
- Mahfudhi, M. Anas, dan Perdana Aditya. 2022. "The Relationship between Civil Society Organization and Political Party in Legislative Election: The CASE OF Fatayat and PKB in Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12 (1): 105–26.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford University Press. https://www.amazon.com/Politics-Presence-Oxford-Political-Theory/dp/0198294158?utm_source=chatgpt.com#detailBullets_feature_div.
- Pimpinan Pusat Fatayat NU. 2010. *Profile Fatayat NU Sukses Fatayat NU, Sukses Perempuan Indonesia*. Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat NU.
- . 2014. *Panduan Umum Pembentukan dan Pengelolaan LKP3A Fatayat NU*. Jakarta Pusat: PP Fatayat NU.
- Pramudita, Roni Renaldi, Prahasti Suyaman, dan Asti Sri Mulyanti. 2024. "Representation And Participation Of Women In Indonesian Political Parties." *Krtha Bhayangkara* 18 (3). Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: 609–21.
- Rini, Anggia Erma, Margaret Aliyatul Maemunah, Titik Mas'udah, Nur Nadlifah, Erni Sugiyanti, Khizanaturrohman, Sri Rahayu, Farida Farichah, dan Ervi Siti Zuhro. 2022. "PPOA (Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi) PP Fatayat NU." Jakarta.
- Safi', Imam, dan Hadi Ismanto. 2021. "Konstruksi Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Fatayat NU Situbondo)." *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 6 (1): 76–90.
- Safitri, Yuli, Mardian Idris Harahap, dan Elly Warnisyah. 2025. "Analisis Relasi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Tahun 2024 di Kabupaten Langkat." *Jurnal Yaqzhan* 11 (01).

- Syahputra, Wahyudi, Uqbatul Khoir Rambe, dan Agusman Damanik. 2024. “Peran Sosialisasi PPK dalam Mengoptimalkan Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus PPK Kecamatan Nibung Hangus).” *Al-Harakah: Jurnal Studi Islam* 6 (1): 53–59.
- Syakra, Diana, Keisha Maulidia, dan Khikmawanto. 2024. “Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Politik di Indonesia.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4 (4). Publikasi Indonesia: 889–93.
- Zuhriyandi, dan Mumtaz Ibnu Yasa. 2024. “Ghirah dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur’an (Analisis Semangat Bela Agama pada QS Al-An’am Ayat 68-70).” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3 (1). Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an As-Syifa: 95–107.

